

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang multikultural, terdiri dari berbagai kebudayaan dan memiliki bermacam-macam etnis, diantaranya etnis Madura, etnis Jawa, etnis Papua dan etnis orang Tionghoa serta memiliki pulau-pulau yang terbentang dari sabang hingga merauke. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki kelompok-kelompok etnis keagamaan dan etnis ras yang beragam.<sup>1</sup> Menurut mantan Presiden Republik Indonesia ke empat Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, menyatakan bahwa bangsa Indonesia terbagi menjadi tiga etnis, yakni etnis Austro-Melanesia, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa.<sup>2</sup>

Awal Orde Baru (1966-1998), Presiden Soeharto menerapkan sebuah kebijakan mengenai asimilasi bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia ingin menciptakan sebuah bangsa yang homogen, sehingga pemerintah membuat kebijakan tersebut. Homogen dalam artian kelompok etnis Tionghoa disejajarkan dengan pribumi, sehingga kesimpulannya etnis Tionghoa dipandang sebagai bukan warga pribumi. Selain kebijakan asimilasi, rezim Soeharto juga menerapkan kebijakan indegenisasi diantaranya yakni, pertama peraturan mengubah nama pada tahun 1966, kedua yaitu merayakan hari raya serta melakukan tradisi-tradisi Tionghoa di depan khalayak umum pada tahun 1967, dan yang ketiga menghilangkan tiga pilar kultur Tionghoa yakni media yang berbahasa Tionghoa pada tahun 1965, organisasi-organisasi orang Tionghoa yang bersifat politik maupun sosial serta sekolah-sekolah yang berbahasa Tionghoa tahun 1966. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dengan adanya kebijakan asimilasi semua komunitas etnis Tionghoa sebagai komunitas yang terasingkan akan hilang. Kebijakan yang telah diterapkan tersebut membuat kelompok etnis Tionghoa semakin kuat untuk mempertahankan kebudayaan mereka agar kebudayaan mereka tidak punah walaupun bukan di negeri mereka.<sup>3</sup>

Penduduk dengan status keturunan Tionghoa merupakan kelompok minoritas yang tersegregasi sosial.<sup>4</sup> Segregasi sosial menyebabkan mereka dikucilkan atau diasingkan oleh penduduk pribumi.<sup>5</sup> Orang Indonesia atau kaum pribumi banyak yang beranggapan bahwa kaum keturunan Tionghoa merupakan kelompok yang eksklusif, tidak mau bergaul dan cenderung sombong. Anggapan-anggapan itu disebabkan karena kaum etnis Tionghoa dalam hal ekonomi sangat maju dan makmur. Mereka kelompok pekerja keras serta giat dalam bekerja, sehingga hal tersebut yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Umumnya masyarakat pribumi lebih terfokuskan pada pekerjaan di bidang agraria atau pertanian serta pegawai pemerintah sedangkan masyarakat keturunan Tionghoa lebih terfokuskan pada pekerjaan di bidang perdagangan.<sup>6</sup>

Kecemburuan sosial yang terjadi pada masyarakat pribumi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Konflik sosial anti kaum Tionghoa di Indonesia pada tahun 1998 salah satunya terjadi di daerah Solo, aksi bakar kios-kios milik kaum

---

<sup>1</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

<sup>2</sup> Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 23.

<sup>3</sup> Wibowo, Thung Ju Lan, *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. (Jakarta: Kompas, 2010), 76-78.

<sup>4</sup> Segregasi merupakan pemisahan ras atau etnis atau dapat disebut juga dengan diskriminasi. Lihat dalam Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 307-309.

Tionghoa terjadi di daerah Solo dan rumah-rumah milik kaum Tionghoa juga dijarah oleh masyarakat pribumi.<sup>7</sup> Aksi lain yang dilakukan para warga pribumi yakni adanya tindak pelecehan seksual terhadap kaum wanita keturunan Tionghoa. Kaum wanita keturunan Tionghoa banyak yang menjadi korban tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh para warga pribumi. Selain di kota Solo, konflik sosial juga terjadi di berbagai kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Kebumen.

Sebelum terjadinya konflik, Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang aman dan tentram serta mempunyai slogan “Kebumen Beriman” yang berarti Kebumen Bersih Indah dan Nyaman. Selain itu, slogan tersebut juga memiliki arti lain yakni Kabupaten Kebumen sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya banyak didirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren di Kabupaten Kebumen pada tahun 1998 berjumlah hingga 95 lembaga<sup>8</sup>, salah satunya pondok pesantren Kyai Somalangu serta pondok pesantren Al-Huda. Akibat adanya perselisihan yang terjadi antara kaum pribumi dengan kaum keturunan Tionghoa menyebabkan masyarakat Kebumen menjadi berubah dan melupakan slogannya.

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi bagian terpenting guna menganalisis sebuah karya ilmiah. Penulis memfokuskan pada faktor-faktor atau latar belakang terjadinya konflik sosial, sehingga penulis menggunakan buku yang berjudul *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia* karya Loekman Soetrisno yang diterbitkan oleh Tajidu Press pada tahun 2003. Buku digunakan untuk mengetahui makna dari konflik sendiri dan unsur-unsur konflik sosial serta bagaimana suatu konflik sosial itu terjadi. Konflik bukan hanya bermakna disfungsi akan tetapi bermakna fungsional, konflik dapat menjadi wahana untuk mendorong terjadinya suatu perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Konflik juga bersifat destruktif, maksudnya disini ialah konflik tersebut dipicu adanya kebencian dari masing-masing yang terlibat konflik.<sup>9</sup>

Buku yang berjudul *Konflik-konflik dalam Ilmu Sosial* karya Anton van Harskamp (Ed.) yang diterbitkan oleh Kanisius pada tahun 2005, menurut Williams, konflik dapat dikategorikan sebagai konflik nyata yaitu antara konflik sesungguhnya dengan konflik terbuka. Konflik sesungguhnya dapat berkembang menjadi konflik terbuka, tergantung pada sikap dan moral para masyarakat sehingga konflik terbuka harus dapat diselesaikan.<sup>10</sup> Hal tersebut penulis gunakan sebagai acuan untuk melihat konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kebumen merupakan konflik yang terbuka serta melihat bagaimana reaksi atau moral para masyarakat sekitar yang ikut terlibat dalam konflik sosial tahun 1998.

Selain itu, penulis juga menggunakan buku yang berjudul *Tionghoa Indonesia dalam Krisis* karya Charles A. Coppel yang diterbitkan oleh Penebar Swadaya pada tahun 1994. Buku mengulas seluk-beluk masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, dimana keturunan Tionghoa sendiri terbagi menjadi dua yakni keturunan Tionghoa yang benar-benar lahir di Tionghoa kemudian tinggal

---

<sup>7</sup> Akhmad Arif Musadad, dalam penelitian kelompok *Konflik antar etnis di Surakarta: studi tentang latar belakang, proses, dan dampak kerusuhan anti Cina Mei 1998 di Surakarta*, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 1999), hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Data Statistik 1998, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Bab IV Sosial*, Tabel 4.45., dalam buku *Kebumen Dalam Angka 2000*, hlm. 123.

<sup>9</sup> Loekman Soetrisno, *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. (Yogyakarta: Tajidu Press, 2003), hlm. 13-21.

<sup>10</sup> Anton van Harskamp (Ed.), *Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 1-7.

di Indonesia dan keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia.<sup>11</sup> Studi empiris mengatakan bahwa prasangka anti Tionghoa di Indonesia hampir tidak diusahakan, permusuhan terhadap orang Tionghoa tidak hanya terbatas pada faktor ekonomi saja melainkan juga faktor sosial yang terkadang ditafsirkan dalam golongan si kaya dan golongan si miskin, sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 1998 hubungan antara masyarakat pribumi dengan kaum Tionghoa kebanyakan saling bermusuhan.<sup>12</sup>

Buku yang berjudul *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik* karya Justian Suhandinata yang diterbitkan oleh Gramedia tahun 2003, menyatakan bahwa kebijakan politik Orde Baru (1966-1998) mengandung banyak kritikan, pada masa tersebut etnis Tionghoa diberikan sedikit hak istimewa serta perlakuan khusus sehingga menjadikan terjadinya kecemburuan sosial terhadap warga pribumi. Kaum Tionghoa sadar bahwa warga pribumi tidak menerima kedatangan mereka dengan sepenuh hati melainkan hanya setengah hati dan berdampak sosial yang tidak baik, sebab kebanyakan warga pribumi menginginkan hak istimewa dan perlakuan khusus juga dan lebih daripada para kaum Tionghoa.<sup>13</sup> Buku tersebut dapat memberikan jawaban kondisi Indonesia di tahun 1998 sangat tidak beraturan, sebab di tahun tersebut banyak terjadi kerusuhan dan konflik-konflik sosial.

Buku yang berjudul *Rusuh di Kebumen 7 September 1998* karya Aris Saharjo, dkk, yang diterbitkan oleh ISAI tahun 1999. Buku mengulas tentang kronologi awal terjadinya konflik sosial serta berbagai macam dampak yang ditinggalkan pasca kejadian konflik tersebut.<sup>14</sup> Buku tersebut dapat menjawab latar belakang dan motif awal terjadinya konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Kuntowijoyo, yakni:<sup>15</sup>

### 1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam memulai sebuah penelitian. Penulis melakukan pemilihan topik berdasarkan kedekatan emosional berawal dari pemilihan judul mengenai *Konflik Sosial di Kabupaten Kebumen tahun 1998*, dan yang dikaji adalah dari sisi sosialnya, penulis mengamati bagaimana kondisi sosial pada saat terjadinya konflik tersebut. Penulis memilih Kabupaten Kebumen sebab Kebumen merupakan kota asal penulis serta Kabupaten Kebumen masih memiliki banyak kisah atau peristiwa yang unik dan jarang dikaji atau diteliti oleh para penulis lainnya. Selain itu, Kebumen juga menjadi salah satu kabupaten yang anti terhadap kaum Tionghoa pada saat itu. Alasan penulis dalam pemilihan topik berdasarkan kedekatan intelektual ialah pada tahun 1998 di Kabupaten Kebumen terjadi perselisihan antara kaum pribumi dengan etnis Tionghoa. Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kebumen bersumbu dari peristiwa nasional tahun 1998 yang terjadi di Jakarta hingga menjalar ke wilayah daerah seperti Solo dan Kabupaten Kebumen. Selain itu, penulis juga ingin mengamati bagaimana kondisi psikis para warga pribumi maupun etnis Tionghoa yang menjadi korban konflik. Penulis juga ingin meneliti seberapa

---

<sup>11</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 21-33.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 57-59.

<sup>13</sup> Justian Suhandinata, *op.cit.*, hlm. 343.

<sup>14</sup> Aris Saharjo, dkk, *Rusuh Di Kebumen 7 September 1998*, (Kebumen: ISAI, 1999), hlm. 29.

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 20.

besar peranan konflik tersebut bagi para warga pribumi. Tema tersebut penulis pilih sebab konflik tersebut sangat berpengaruh besar terhadap infrastruktur Kabupaten Kebumen sendiri.

## 2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik merupakan langkah kedua dalam melakukan sebuah penelitian sejarah. Menurut urutan penyampainnya sumber sejarah dibedakan menjadi dua macam sumber, yakni :

### a) Sumber Primer

Sumber primer dapat didefinisikan sebagai catatan para saksi mata sejarah yang benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut.<sup>16</sup> Sumber primer yang digunakan adalah kesaksian dari beberapa saksi masyarakat pribumi maupun kaum Tionghoa yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan kesaksian dari aparat setempat saat mengeksekusi terjadinya konflik. Pencarian dan pengumpulan sumber penulis menggunakan teknik wawancara atau dapat dikatakan penulis mencari sumber-sumber lisan dari beberapa saksi dan pelaku serta korban. Selain itu, sumber primer lainnya yakni dokumentasi-dokumentasi berupa foto-foto saat kejadian berlangsung. Dokumentasi tersebut penulis dapatkan dari beberapa dokumen yang ada di Polres Kabupaten Kebumen.

### b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder berasal dari sumber buku yang keterangannya diperoleh dari pihak kedua yang memperoleh berita dari sumber primer dan tidak satu zaman dengan peristiwa yang telah terjadi.<sup>17</sup> Sumber sekunder yang digunakan penulis gunakan antara lain:

Anton van Harskamp (Ed.). 2005. *Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Aris Saharjo, dkk., 1999. *Rusuh Di Kebumen 7 September 1998*. Kebumen: ISAI.

Charles A. Coppel. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Justian Suhandinata. 2008. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Loekman Soetrisno, 2003. *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press.

Novri Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Selain itu, penulis juga menggunakan sumber sekunder yang lainnya berupa beberapa koran yang memberitakan aksi kejadian di Kabupaten Kebumen pada tanggal 7 dan 8 September 1998 dan arsip daerah berupa kondisi geografis Kabupaten Kebumen secara umum serta kondisi demografi dari Kabupaten Kebumen pada tahun 1998.

## 3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi data dilakukan dengan cara melalui kritik sumber, kritik sumber sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni kritik intern dan kritik ekstern.<sup>18</sup> Kritik intern bertujuan untuk menguji keabsahan tentang kebenaran sumber yang terdapat dalam sumber tertulis, sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian sumber. Kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan atau mengecek kembali sumber satu dengan yang lain.

## 4. Intepretasi

---

<sup>16</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 97-98.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

<sup>18</sup> I Gde Widja, *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 18.

Intepretasi sering disebut juga dengan penfsiran sejarah. Intepretasi sendiri sangat perlu dilakukan sebab untuk mengurangi subyektifitas dalam kajian sejarah.<sup>19</sup> Intepretasi sendiri memiliki dua tahap yakni tahap analisis dan tahap sintesis. Analisis merupakan tahap menguraikan, sedangkan sintesis ialah menyatukan. Tahap tersebut bertujuan guna menganalisis serta menguraikan sumber-sumber sejarah yang telah di dapat yang kemudian sumber-sumber tersebut disatukan sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah fakta sejarah.<sup>20</sup>

#### 5. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Penulisan sejarah atau historiografi merupakan sebuah penyusunan sejarah yang didahului oleh penelitian terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau.<sup>21</sup> Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah kisah sejarah yang berbentuk tulisan. Tahap ini penulis dituntut untuk berfikir kritis dan analitis serta lebih memperhatikan aspek-aspek kronologis peristiwa. Selain itu, data-data yang telah di dapat harus disajikan secara detail serta sesuai dengan kronologisnya.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan geografis, pendekatan sosial serta pendekatan psikologis.

#### a) Pendekatan Geografis

H. C. Darby mengungkapkan bahwa dalam studi geografi sejarah terdapat empat pendekatan, yakni pertama ialah kondisi geografi pada masa lalu yang berkaitan dengan perbandingan keadaan geografi suatu wilayah secara horizontal di masa lalu, sedangkan pendekatan yang kedua ialah perubahan *landscape* (bentang alam) yang berkaitan dengan berbagai perubahan transformasi bersifat vertikal. Ketiga yakni keadaan masa lalu yang dijelaskan berdasarkan letak geografisnya di waktu kini, dan yang keempat yakni sejarah yang bersifat geografis, menjelaskan mengenai kondisi geografis yang mempengaruhi jalannya sebuah sejarah, sehingga dari keempat pendekatan tersebut ilmu geografi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendekatan yang menggunakan data-data sejarah akan tetapi masalah dan metodenya bersifat geografis.<sup>22</sup> Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori Hagget, yakni cabang geografi terbagi menjadi dua cabang, geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik ialah cabang geografi yang menjelaskan aspek-aspek fisik permukaan bumi, seperti tanah, air, dan segala yang menjadi lingkungan hidup manusia, sedangkan geografi manusia ialah geografi sosial yang mengaitkan ilmu-ilmu sosial dan alamiah yang menjadi subyeknya.<sup>23</sup> Teori ini digunakan pada bab kedua guna menganalisis kondisi geografis Kabupaten Kebumen secara fisik di tahun 1998 serta menganalisis data-data demografi yang terkait dengan kependudukan di tahun 1998. Selain itu, teori tersebut juga penulis gunakan guna menganalisis hubungan masyarakat pribumi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa.

#### b) Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang mengkaji fenomena sosial bukan hanya perilaku masing-masing individu akan tetapi juga fenomena kelompok-kelompok sosial.<sup>24</sup> Fenomena kelompok sosial tersebut menjadikan masyarakatnya secara keseluruhan sebagai bahan kajian.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 102-104.

<sup>21</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007), hlm. 72.

<sup>22</sup> Abd. Rahman Hamid, Muhammad Saleh Madjid, *op.cit.*, hlm. 36-37.

<sup>23</sup> Supardi, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>24</sup> M. Zaini Hasan, *Pengantar Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 2.

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003), hlm. 41.

Kajian ini menggunakan teori Weber, yang menyatakan bahwa ilmu sosial memiliki pengaruh kuat menangani peristiwa konflik-konflik yang terjadi dengan cara yang rasional.<sup>26</sup> Pengaruh kuat tersebut juga berkaitan dengan interaksi masyarakat terhadap kelompoknya maupun kelompok-kelompok lainnya. Selain itu, kajian ini juga menggunakan teori konflik. Teori konflik merupakan teori lanjutan dari teori struktural fungsional, teori ini didasarkan pada bahwa manusia memiliki unsur-unsur konflik.<sup>27</sup> Teori konflik sendiri menurut ahli bernama Simmel yakni saat suatu konflik menjadi bagian dari proses interaksi sosial, maka konflik tersebut menciptakan suatu batasan antar kelompok dengan cara memperkuat kesadaran internal untuk membuat kelompok tersebut menjadi berbeda dan terpisah dari kelompok lainnya, sehingga membuat suatu permusuhan. Permusuhan tersebut merupakan timbal balik guna menciptakan identitas dari berbagai macam kelompok.<sup>28</sup> Teori di atas peneliti gunakan pada bab ketiga guna menganalisis proses interaksi para warga pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, serta menganalisis pola interaksi diantara masing-masing kelompok warga pribumi maupun keturunan Tionghoa sehingga dapat menimbulkan sebuah konflik.

#### c) Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang mengacu pada objek kajian sejarah yang berkaitan dengan mental dan kejiwaan manusia sebagai tindakan yang dilakukan.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan teori George Homans, yakni perhatian utama perilaku masyarakat terletak pada tingkah laku sosial dasar, tingkah laku tersebut akan muncul kembali tanpa direncanakan sebelumnya, serta tingkah laku tersebut dapat dijelaskan dengan berbagai masalah yang terjadi.<sup>30</sup> Tingkah laku masyarakat sangat berperan dalam sebuah situasi yang sedang terjadi termasuk tingkah laku kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh ahli bernama Gustave Le Bon (1841-1931) bahwa jika banyak orang-orang yang berkumpul hingga lebih dari dua orang di suatu tempat tertentu, masing-masing akan memperlihatkan tingkah laku maupun perilaku yang sangat berbeda dari karakteristik diri mereka. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah jiwa kelompok yang tidak mau patuh terhadap sikap salah satu individu dan lebih memilih untuk diatur dengan hukum kesatuan mental dari kelompok tersebut.<sup>31</sup> Kedua teori di atas peneliti gunakan pada bab keempat guna menganalisis tingkah laku kelompok masyarakat pribumi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa sehingga dapat menimbulkan sebuah konflik dan menyebabkan dampak psikis bagi warga keturunan Tionghoa.

## II. Pembahasan

### A. Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 1998

#### 1. Kondisi Kabupaten Kebumen Secara Geografis

Kabupaten Kebumen berada di bagian selatan propinsi Jawa Tengah.<sup>32</sup> Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang termasuk dalam Daerah Tingkat II. Kabupaten Kebumen memiliki dua jenis tanah, yakni tanah sawah dan tanah kering. Luas Kabupaten Kebumen bila dilihat dari rincian tanah sawah pada tahun 1998 yakni berkisar 38.212,66 Ha, sedangkan bila dilihat dari rincian tanah

---

<sup>26</sup> M. Zaini Hasan, *op.cit.*, hlm. 2-3.

<sup>27</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Post Modern*. (Yogyakarta: Tajidu Press, 2012), hlm. 39.

<sup>28</sup> Novri Susan, *op.cit.*, hlm. 48.

<sup>29</sup> Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 97.

<sup>30</sup> Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. (Yogyakarta: Tiara Sosial, 1992), hlm. 68.

<sup>31</sup> Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 208-209.

<sup>32</sup> Aris Saharjo, dkk, *op.cit.*, hlm. 1.

kering pada tahun 1998 luas Kabupaten Kebumen yakni 89.989,84 Ha.<sup>33</sup> Luas keseluruhan Kabupaten Kebumen sendiri ialah 128.111.50 Ha atau 1.281.115 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27<sup>1</sup> - 7°50<sup>1</sup> lintang selatan dan 109°22<sup>1</sup> – 109°50<sup>1</sup> bujur timur, sehingga wilayah kabupaten ini berada di iklim tropis, dengan dua musim hujan dan kemarau.<sup>34</sup> Tercatat pada tahun 1998 curah hujan di kabupaten ini mencapai angka 324,4 mm.<sup>35</sup>

Kabupaten Kebumen juga berbatasan dengan beberapa wilayah Kabupaten lain yaitu, di sebelah barat Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, sedangkan di sebelah timur Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Sebelah selatan Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Samudera Indonesia.<sup>36</sup> Bila dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah yang terletak di dataran rendah, yakni antara 5m-91m diatas permukaan laut.<sup>37</sup>

## **2. Kondisi Kabupaten Kebumen Secara Demografis**

Berdasarkan data statistik tahun 1998, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen berjumlah 1.217.577 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk laki-laki berjumlah 598.073 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 619.504 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 6.727 jiwa.<sup>38</sup> Data jumlah keseluruhan penduduk tersebut diperoleh dari hasil sensus penduduk per-kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Penduduk Kabupaten Kebumen mayoritas berkewarganegaraan Indonesia. Penduduk dengan status kewarganegaraan Indonesia sendiri terdiri dari warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia keturunan. Hal ini komposisi jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen juga bukan hanya warga asli Kebumen saja yang tinggal di kabupaten ini, melainkan juga warga keturunan negara lain, yakni misalnya warga negara Indonesia keturunan Arab dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen beragama Islam. Pada tahun 1998 penduduk Kabupaten Kebumen yang menganut agama Islam berjumlah hingga 1.200.587 jiwa. Selain agama Islam, penduduk Kabupaten Kebumen juga menganut agama lainnya yakni seperti Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan lainnya. Penduduk Kabupaten Kebumen yang menganut agama Katholik di tahun 1998 berjumlah 5.680 jiwa, agama Protestan berjumlah 7.505 jiwa, agama Hindu berjumlah 375 jiwa, dan agama Budha 3.430 jiwa.

## **3. Hubungan Interaksi Warga Pribumi Terhadap Warga Keturunan Tionghoa**

Kajian ini peneliti menyoroti mengenai hubungan interaksi masyarakat pribumi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa dalam aksi yang dilakukan oleh warga pribumi terhadap warga keturunan Tionghoa. Sikap tertutup dan terkesan eksklusif menjadi faktor terbesar adanya dendam pribadi, mengingat bahwa konflik yang terjadi berawal dari dendam hingga menyebabkan aksi pembakaran dan penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi terhadap warga keturunan Tionghoa. Sikap yang terkesan tertutup dan terkesan eksklusif bukan hanya terjadi di Kabupaten Kebumen saja, melainkan juga terjadi di berbagai wilayah, misalnya di Jakarta, Aceh dan Makasar.

Ciri-ciri masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di Jakarta salah satunya yakni mereka cenderung acuh tak acuh terhadap kondisi yang sedang melanda maupun apapun yang sedang

---

<sup>33</sup> Data Statistik 1998, *Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kebumen, Bab I Letak dan Geografis*, Tabel 1.1.1 dalam buku *Kebumen Dalam Angka 2000*, hlm. 1.

<sup>34</sup> *Ibid*, Tabel 1.1.1., hlm. 1.

<sup>35</sup> *Ibid*, Tabel 1.7., hlm. 9.

<sup>36</sup> *Ibid*, Tabel 1.1.1., hlm. 1.

<sup>37</sup> *Perncaanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) di Kabupaten Dati II, Laporan Akhir, Tahun Anggaran 1997-1998*, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian UNDIP Semarang, hlm. II-2.

<sup>38</sup> Data Statistik 1998, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Bab III Penduduk, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Keluarga Berencana*, Tabel 3.1, dalam buku *Kebumen Dalam Angka 2000*, hlm. 40.

terjadi di kota mereka tinggal, sedangkan ciri-ciri masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Aceh yakni mereka cenderung memilih tinggal di kota maupun di pelabuhan-pelabuhan sehingga memudahkan mereka dalam mencari informasi mengenai dunia dagang serta mempermudah mereka dalam berinteraksi dalam hal transaksi perdagangan.<sup>39</sup>

Karakteristik masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Makasar sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah lain, yakni bukan hanya mereka bersikap sedikit tertutup terhadap warga pribumi akibat adanya Peraturan Pemerintah 10, tahun 1959 (PP 10) akan tetapi juga sedikit menutup diri terhadap masyarakat Tionghoa peranakan. Masyarakat yang cenderung tertutup tersebut berasal dari warga keturunan Tionghoa totok.<sup>40</sup> Keturunan Tionghoa totok yakni warga keturunan asli Tionghoa yang menetap di Indonesia dan berkiblat pada negaranya sendiri, sedangkan keturunan Tionghoa peranakan ialah warga keturunan Tionghoa yang menikah dengan warga pribumi dan menetap di Indonesia.<sup>41</sup> Karakteristik masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Kebumen juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat keturunan Tionghoa di wilayah lainnya. Eksklusif dan tidak terbuka menjadi pendapat awal bagi masyarakat pribumi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Mayoritas masyarakat keturunan Tionghoa di Kabupaten Kebumen tinggal di pusat kota dan membangun pertokoan serta rumah. Hal tersebut dilakukan sebab mereka cenderung menguasai dunia perdagangan yang ada di Kabupaten Kebumen. Pertokoan-pertokoan yang ada di pinggiran pusat kota mayoritas milik warga keturunan Tionghoa, sedangkan untuk warga pribumi mereka hanya menguasai perdagangan di pasar tradisional.<sup>42</sup>

Karakteristik masyarakat keturunan Tionghoa dari masing-masing wilayah memiliki hampir persamaan yakni mereka cenderung berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Mereka juga hanya terfokuskan dengan dunia perdagangan dan cenderung kurang berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan wilayah mereka masing-masing. Hal tersebut yang memicu adanya persepsi sikap yang eksklusif dan sombong terhadap warga keturunan Tionghoa.

## **B. Terjadinya Konflik Sosial di Kabupaten Kebumen**

### **1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun 1998**

#### **a. Perubahan Sosial**

Perubahan sosial ialah sebuah kondisi yang telah terikat erat dengan masyarakatnya. Menurut Wilbert Moore, perubahan sosial dipandang sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Sedangkan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi terhadap lembaga kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial dalam masyarakat, misalnya nilai, sikap serta pola perilaku antar kelompok dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesimpulannya yakni perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang meliputi hubungan interaksi antar golongan dan pola perilaku masyarakat dengan berisikan tuntutan kehidupan yang stabil.<sup>43</sup> Masyarakat pribumi yang awalnya berhubungan baik terhadap masyarakat keturunan Tionghoa seketika itu berubah dikarenakan adanya rasa dendam dan selisih paham antara masyarakat pribumi dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Rasa dendam dan selisih paham yang dipendam selama berbulan-bulan itu

---

<sup>39</sup> A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 247-248.

<sup>40</sup> Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Masyarakat Dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20*. (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 243-244.

<sup>41</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm 85-90.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Priyono, pada tanggal 12 April 2015, bertempat di desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

<sup>43</sup> Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 49-51.



memicu terjadinya konflik sosial di kabupaten Kebumen.<sup>44</sup> Masyarakat pribumi menjadi marah seketika salah seorang warga keturunan Tionghoa melakukan kekerasan terhadap warga pribumi yang bekerja pada warga keturunan Tionghoa tersebut, sehingga konflik sosial itupun tak dapat dihindarkan.

#### **b. Diskriminasi**

Diskriminasi ialah sebuah tindakan yang membedakan kelompok masyarakat dari berbagai aspek, misal etnis, suku, ras, status dan kelompok sosial ekonomi serta kebangsaan seseorang.<sup>45</sup> Diskriminasi timbul disebabkan adanya prasangka terhadap masyarakat lain. Prasangka sendiri merupakan sikap yang mengacu pada permusuhan yang ditujukan pada suatu kelompok lain yang didasarkan pada dugaan bahwa kelompok tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak menyenangkan serta menyebabkan orang tersebut tidak berpikir rasional sehingga susah untuk mengubah perilaku itu walaupun sudah ada bukti yang tertera.<sup>46</sup> Perlakuan diskriminasi dan prasangka itu dapat memicu tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat hingga timbul konflik antar golongan.

#### **c. Ethnocentrisme**

Ethnocentrisme merupakan sikap yang mengedepankan ego dalam menilai sebuah kebudayaan milik kelompok lain dan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam kebudayaannya sendiri. Ethnocentrisme merupakan sebuah gejala sosial dengan kecenderungan menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri dianggap paling baik serta sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakannya dengan kebudayaan lain.<sup>47</sup> Gejala yang seperti itu dapat memicu adanya kesalahpahaman antar kelompok.

## **2. Jalannya Konflik**

### **a. Kronologi Kejadian**

Konflik ini berawal dari isu ketidaksukaan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa yang memperlakukan pekerjaannya dengan semena-mena.<sup>48</sup> Pekerja tersebut bernama Sukiman, sedang etnis Tionghoa itu terkenal dengan sebutan keluarga Yohanes. Teman-teman Sukiman membawa masalah ini hingga ke Polsek Kabupaten Kebumen agar pihak keluarga ini ditimpal hukuman atas perbuatannya terhadap Sukiman, akan tetapi keluarga ini tidak datang ke Polsek Kecamatan Kebumen dan melarikan diri. Teman-teman Sukiman yang sudah terlanjur kesal dan dendam akhirnya mendatangi toko milik keluarga Yohanes dan mengobrak-abrik seluruh isi toko hingga salah seorang yang ditetapkan sebagai pelaku bernama Karyono menumpahkan oli dan menyuruh salah seorang temannya yang juga ditetapkan sebagai pelaku bernama Lantra untuk membakar ban di depan toko tersebut.<sup>49</sup> Kejadian tersebut terjadi tepat saat jam pulang anak-anak sekolah, setelah mereka melihat kejadian tersebut mereka yang masih labil ikut melakukan aksi penjarahan. Aksi penjarahan berlangsung hingga dua hari berturut-turut yakni sejak tanggal 7-8 September 1998. Kondisi kota sangat kacau, mengecam dan asap tebal membumbung dimana-mana. Masyarakat pribumi maupun keturunan Tionghoa sekitar yang memiliki toko tidak ada yang berani membuka tokonya. Mereka takut toko mereka diserang oleh massa, untuk menghindari penyerangan tersebut warga setempat memasang pernyataan yang berbunyi "Jawa Asli" di setiap pagar depan rumah mereka atau dipasang di toko-toko mereka sehingga toko ataupun rumah mereka terhindar dari

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, 39 tahun, pada tanggal 21 Mei 2015, bertempat di terminal angkot Kebumen.

<sup>45</sup> Elly M. Setiadi, *op.cit.*, hlm. 154.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>47</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 279.

<sup>48</sup> "Gara-gara Isu Penganiayaan Kebumen Geger, Puluhan Toko Dibakar", *Kedaulatan Rakyat*, Selasa Legi, 8 September 1998, hlm. 1.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, pada tanggal 21 Mei 2015, bertempat di terminal angkot Kebumen.

jarahan massa.<sup>50</sup> Kondisi kota Kebumen sangat kacau karena listrik dipadamkan sejak hari Senin tanggal 7 September 1998 pukul 21.00 WIB hingga hari Selasa tanggal 8 September 1998.<sup>51</sup> Selain itu, kondisi kota juga lumpuh akibat aksi perusuh tersebut. Akibat kejadian tersebut 74 toko serta gudang habis diamuk massa. Petugas berhasil mengamankan 136 orang, 30 diantaranya merupakan pelajar yang terlibat aksi tersebut serta 59 diantaranya merupakan orang-orang yang tertangkap basah membawa barang jarahan.<sup>52</sup> Beberapa bank yang ada di Kabupaten Kebumen juga terkena dampak diamuk para peusuh, salah satunya yakni Bank Lippo yang berada di Jalan Pahlawan. Para korban yakni warga keturunan Tionghoa mereka diamankan di daerah Keposan yang terletak di Jalan Pemuda, guna menghindari mereka dari amukan perusuh yang berjumlah hingga ratusan warga pribumi. Aksi perusuh yang membakar toko-toko milik warga keturunan Tionghoa dimanfaatkan oleh para warga pribumi untuk menjarah dan mengambil barang-barang berharga milik warga keturunan Tionghoa pada pagi harinya.

#### b. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah dengan cara penyelesaian di ranah hukum walaupun bersifat parsial. Pihak aparat yang berhasil menangkap para pelaku pembakaran maupun penjarahan langsung melakukan persidangan di pengadilan negeri Kebumen pada tanggal 9 September 1998. Para pelaku penjarahan hanya dijatuhi hukuman ringan, dengan menunjukkan barang jarahan dan membayar denda sebesar Rp 2.000 hingga Rp. 35.000 sesuai dengan banyaknya barang yang dijarah oleh mereka. Proses persidangan berlangsung dengan cepat, sebab mereka umumnya dikenakan pasal 363 dan 364 KUHP.<sup>53</sup> Hukuman ringan yang mereka dapat ialah dipenjara selama 4 hingga lima belas hari penjara di Polres Kebumen.<sup>54</sup> Pasal 363 dan 364 KUHP sendiri masing-masing berisikan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari maupun siang hari dan berisikan tentang pencurian kurang dari Rp 2.500.000. Pencurian yang dilakukan pada siang hari tersebut memiliki ketentuan yakni dengan merusak pintu maupun jendela.<sup>55</sup> Pelaku pembakaran yang berhasil ditangkap polisi dan didakwa sebagai pelaku utama berjumlah lima orang, kelima orang tersebut ialah Lantrah, Yongki Maret, Karyono, Daryono, serta Prapto. Persidangan dilakukan melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Daryono dan Prapto dikarenakan didampingi oleh pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, keduanya berhasil dibebaskan dari dakwaan sebab tidak adanya bukti yang kuat, sedangkan ketiga pelaku lainnya dikarenakan mereka tetap menolak untuk mendapat bantuan pengacara mereka dijatuhi hukuman masing-masing dua tahun penjara untuk pelaku Lantrah dan Karyono dan untuk Yongki Maret dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.<sup>56</sup>

### 3. Dampak Konflik Sosial Bagi Masyarakat Kabupaten Kebumen

#### a. Dampak Sosial

Menurut para ahli, masalah sosial merupakan kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat berdasarkan studi dan mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan aparat polisi bernama Daryadi, pada tanggal 23 April 2015, bertempat di Polres Kebumen.

<sup>51</sup> "74 Toko dan Gudang Ludes, 136 Diamankan, Geger Kebumen Meluas, 59 Penjarah Ditangkap", *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 9 September 1998, hlm. 1.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Aris Saharjo, dkk, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 117-118.

<sup>55</sup> Wawancara dengan aparat polisi bernama Daryadi, pada tanggal 23 April 2015, bertempat di Polres Kebumen.

<sup>56</sup> Aris Saharjo, dkk, *op.cit.*, hlm. 105.

terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>57</sup> Masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh tingkah laku manusia dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik-konflik yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia dapat menyebabkan dua dampak yakni dampak positif dan dampak negatif. Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kebumen pada tahun 1998 bila dilihat dari sisi sosial memiliki dampak yang positif salah satunya ialah warga keturunan Tionghoa menjadi lebih memperhatikan masyarakat pribumi yang menjadi pekerja di tokonya, selain itu dampak positif lainnya yakni warga keturunan Tionghoa menjadi lebih bersikap terbuka terhadap warga pribumi, seperti contoh warga keturunan Tionghoa juga ikut berpartisipasi dalam agenda-agenda yang diselenggarakan oleh warga pribumi, misalnya acara 17-an yang diadakan di sekitar tempat tinggal mereka.<sup>58</sup> Proses interaksi sosial yang berubah menjadi lebih baik atau dapat dikatakan berubah menjadi harmonis sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni bagi warga pribumi sendiri dan bagi warga keturunan Tionghoa. Pasalnya, dengan adanya sikap keterbukaan dari masing-masing pihak dapat membantu mereka dalam menangani pola interaksi mereka yang sebelumnya sempat bermasalah. Dampak negatifnya yakni warga keturunan Tionghoa kehilangan mata pencaharian utama mereka karena mayoritas toko-toko milik warga keturunan Tionghoa dibakar dan dijarah. Warga keturunan Tionghoa banyak yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka saat aksi bakar toko serta aksi penjarahan dan menutup toko mereka untuk sementara waktu. Akan tetapi adapula sebagian dari mereka yang menitipkan barang-barang mereka kepada tetangga-tetangga kaum pribumi.<sup>59</sup>

#### **b. Dampak Ekonomi**

Konflik yang terjadi di Kabupaten Kebumen terjadi selama dua hari, yakni pada tanggal 7 dan 8 September 1998. Massa yang mengamuk menyebabkan kerusakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif bagi kabupaten tersebut. Kerusakan kuantitatifnya dapat diukur secara obyektif. Kerugian kuantitatif tersebut berupa kerugian fisik dari dampak yang ditimbulkan, kerugian fisik masing-masing korban berbeda-beda, ada yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, sedangkan untuk kerugian kualitatifnya yakni banyak korban yang kehilangan usaha dan modal. Usaha dan modal mereka sangat berkaitan dengan gairah semangat kerja yang mulai melumpuh akibat kejadian tersebut, sehingga perekonomian Kabupaten Kebumen cenderung menurun<sup>60</sup>, sebab dapat diketahui bahwa dunia perdagangan yang dijalankan oleh warga keturunan Tionghoa merupakan sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduknya, khususnya para penduduk pribumi, mayoritas dari mereka bekerja pada warga keturunan Tionghoa. Dampak ekonomi yang dialami Kabupaten Kebumen menurun hingga 3,52%. Menurut data hasil penelitian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Kebumen, jumlah kerugian fisik kota Kebumen mencapai Rp 7.366.592.670, sehingga dari kondisi tersebut menyebabkan perekonomian Kabupaten Kebumen sangat merosot dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, dampak yang lainnya yakni hilangnya toko-toko sembako serta fasilitas umum lainnya. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi para warga yang selamat untuk mencari sembako guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya sebab distribusi pasar menjadi kacau akibat kejadian kerusuhan tersebut serta banyak unit-unit

---

<sup>57</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2006)

<sup>58</sup> Wawancara dengan warga pribumi bernama Priyono, pada tanggal 12 April 2015, bertempat di desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

<sup>59</sup> Wawancara dengan salah satu korban keturunan Tionghoa bernama Ibu Mei, pada tanggal 6 Juni 2015, bertempat di toko Surya Jaya, Jalan Pahlawan, Kebumen.

<sup>60</sup> Aris Saharjo, dkk, *op.cit.*, hlm. 95.

perdagangan yang pindah ke daerah lain agar terhindar dari kerusuhan-kerusuhan yang akan timbul di lain waktu.<sup>61</sup>

### **c. Dampak Psikologis**

Dampak psikologis yang dirasakan para warga keturunan Tionghoa ialah rasa takut apabila kejadian tersebut terulang kembali. Tak banyak dari mereka yang akhirnya menderita stress berat akibat toko mereka hancur. Seperti yang dirasakan oleh seorang bapak yang menjadi gila, biasa dipanggil "Jek", menurut salah satu korban pemilik toko Slamet yang biasa dipanggil Kokoh, bapak Jek menjadi gila semenjak toko kecilnya hancur dijarah para warga pribumi yang terlibat aksi penjarahan. Sebagian kaum pribumi juga menyayangkan adanya kerusuhan yang terjadi di wilayah mereka. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga pribumi bernama Budi Harjono, beliau sangat kaget dengan adanya aksi bakar toko dan penjarahan yang disebabkan oleh faktor dendam, padahal kesalahpahaman tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan bukan dengan tindakan-tindakan yang merugikan warga keturunan Tionghoa dan juga bagi warga pribumi.<sup>62</sup>

### **d. Infrastruktur Kota Menjadi Terganggu**

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kebumen pada tanggal 7-8 September 1998 membuat kota ini lumpuh, salah satunya yakni lumpuhnya dunia perdagangan yang berada di pusat kota, seperti banyaknya toko-toko sembako yang tutup serta pasar yang berada di pusat kota tidak dapat berjalan seperti biasanya. Mayoritas warga masih takut untuk membuka lapak mereka, dan banyak bangunan yang rusak disekitar pasar.<sup>63</sup> Hal tersebut sangat menyulitkan bagi para kaum pribumi dan warga keturunan Tionghoa yang selamat dari kejadian karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, kerusakan toko-toko serta banyaknya bangkai-bangkai truk dan bangunan yang rubuh menjadi masalah yang besar bagi pemerintah daerah setempat guna mengembalikan jati diri kota tersebut. Dunia pekerjaan yang ada di Kabupaten Kebumen seketika mati dalam beberapa waktu, tidak ada aktivitas yang berjalan pasca kejadian kerusuhan tersebut. Kondisi kota masih sangat kacau dan memprihatinkan. Kerusakan yang dialami toko-toko, bengkel maupun pabrik serta warung-warung kecil rata-rata mencapai 100% rusak dan hancur. Fasilitas umum yang ada di pusat kota juga rusak akibat ulah para pelaku. Kerusakan tersebut dapat terlihat seperti fasilitas lampu rambu-rambu lalu lintas yang berjumlah 10 buah dan trotoar berjumlah 150 buah di sepanjang jalan menuju pusat kota mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Kerugian rambu lalu lintas dan trotoar mencapai Rp 1.025.000,<sup>64</sup> sedangkan untuk kerusakan di bidang perdagangan dan kacaunya distribusi di seluruh kawasan Kabupaten Kebumen kira-kira mencapai hingga Rp 17M.<sup>65</sup>

## **III. Kesimpulan**

Kabupaten Kebumen sendiri merupakan salah satu wilayah yang terletak di dataran rendah, yakni antara 5m-91m dan terletak pada 7°27' - 7°50' lintang selatan dan 109°22' - 109°50' bujur timur, sehingga wilayah kabupaten ini berada di iklim tropis, dengan dua musim hujan dan kemarau.

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 96-97.

<sup>62</sup> Wawancara dengan warga pribumi bernama Budi Harjono, pada tanggal 16 April 2015, bertempat di Perpusda Kabupaten Kebumen.

<sup>63</sup> Wawancara dengan aparat polisi bernama Daryadi, pada tanggal 23 April 2015, bertempat di Polres Kebumen.

<sup>64</sup> Aris Saharjo, dkk, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>65</sup> Wawancara dengan aparat polisi bernama Daryadi, pada tanggal 23 April 2015, bertempat di Polres Kebumen.

Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Kebumen disebabkan adanya konflik sosial yang meliputi adanya kesalahpahaman serta dendam. Kesalahpahaman disini ialah disebabkan oleh adanya perasaan iri dari masing-masing pihak yakni dari pihak warga pribumi maupun warga keturunan Tionghoa. Kedua pihak menganggap bahwa masing-masing sangat beruntung dengan pekerjaan serta kesuksesan yang mereka raih, sehingga hal tersebut memicu adanya kecemburuan sosial. Selain itu, diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Diskriminasi di bidang kepegawaian membuat warga keturunan Tionghoa cemburu dengan warga pribumi. Pasalnya, dalam hal kepegawaian negeri sipil hanya diperuntukkan bagi warga pribumi, sedangkan warga keturunan Tionghoa tidak boleh ikut serta dalam kepegawaian negeri sipil.

Perubahan sosial tingkah laku yang terjadi di lingkungan kehidupan warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi menjadikan lingkungan mereka kurang hidup. Masing-masing pihak cenderung cuek dan tidak peduli dengan kesulitan yang dialami oleh masing-masing pihak baik dari warga pribumi sendiri maupun dari warga keturunan Tionghoa, walaupun tidak semua warganya yang bersikap cuek terhadap yang lain. Beberapa dari mereka juga ada yang peduli satu sama lain. Kecemburuan sosial tersebut mereka alihkan dengan berkecimpung di dunia perdagangan serta bisnis. Mayoritas warga keturunan Tionghoa beralih sebagai pedagang. Mereka membuka usaha kecil-kecilan, dari usaha kecil-kecilan tersebut mereka tekuni hingga mereka dapat meraih kesuksesan. Kesuksesan dari warga keturunan Tionghoa juga membuat iri kaum pribumi, kaum pribumi iri melihat warga keturunan Tionghoa dapat sukses dalam rentang waktu yang begitu cepat. Konflik yang terjadi membuat rugi hingga 17M dan menyebabkan perekonomian Kabupaten Kebumen menurun hingga 3,52%. Kejadian yang menimpa Kabupaten Kebumen menjadi sebuah pelajaran tersendiri untuk para warganya, baik bagi warga pribumi maupun warga keturunan Tionghoa. Pasca kejadian tersebut mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya keterbukaan dan kepedulian dari masing-masing pihak.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Rani Usman. 2009. *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Abd. Rahman Hamid. Muhammad Saleh Madjid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Abu Ahmadi. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akhmad Arif Musadad. (1999). Dalam penelitian kelompok *Konflik antar etnis di Surakarta: studi tentang latar belakang, proses, dan dampak kerusuhan anti Cina Mei 1998 di Surakarta*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Anton van Harskamp (Ed.). (2005). *Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aris Saharjo, dkk. (1999). *Rusuh di Kebumen 7 September 1998*. Kebumen: ISAI
- Badan Statistik Kabupaten Kebumen. (2000). *Kebumen Dalam Angka 2000*. Kebumen
- Charles A. Coppel. (1994). *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dudung Abdurahman. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruz edia.
- Elly M. Setiadi. (2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- I Gde Widja. (1989). *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Justian Suhandinata. (2008). *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. (1979). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

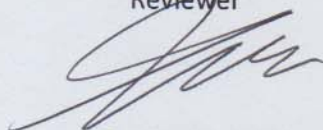
\_\_\_\_\_. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.  
\_\_\_\_\_. (2003). *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.  
Loekman Soetrisno. (2003). *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press.  
Leo Suryadinata, (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.  
\_\_\_\_\_. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

Novri Susan. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.  
M. Zaini Hasan. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.  
Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2006)  
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) di Kabupaten Kebumen Dati II, Laporan Akhir Tahun Anggaran 1997-1998. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian UNDIP, Semarang.  
Rahman Hamid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.  
Sarlito W. Sarwono. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.  
Sindung Haryanto. (2012). *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Post Modern*. Yogyakarta: Tajidu Press.  
Supardi, (2011), *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, Yogyakarta :Ombak.  
Wibowo dan Thung Ju Lan. (2010). *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas.  
Yerry Wirawan. (2013). *Sejarah Masyarakat Tionghoa Masyarakat Dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20*. Jakarta: Gramedia.  
Zamroni. (1992). *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Sosial.  
Redaksi KR, (1998). *Kedaulatan Rakyat*, No. 334, hlm. 1, hlm. 8.  
Redaksi KR, (1998). *Kedaulatan Rakyat*, No. 335, hlm. 1, hlm. 8.  
Redaksi Suara Merdeka, (1998). *Suara Merdeka*. Tersedia pada [http://indo982.tripod.com/n0998/n0998\\_28.html](http://indo982.tripod.com/n0998/n0998_28.html). Diakses pada tanggal 10 November 2014, pukul 13.40 WIB.  
Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia, SP 2010.bps.go.id, diakses pada tanggal 19 Mei 2015, pukul 13.05 WIB.  
[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 24 September 2015, pukul 18.09 WIB.  
<https://tiyoe.wordpress.com/2009/05/24/solo-portai-besi-dan-malam-paling-sunyi-kerusuhan-mei-1998-di-solo/>, diakses pada tanggal 24 September 2015, pukul 18.35 WIB.  
<http://regional.aqkompas.com>, Gregorius Magnus Finesso, diakses pada tanggal 30 Mei 2014, 17.46 WIB.

Yogyakarta, Oktober 2015

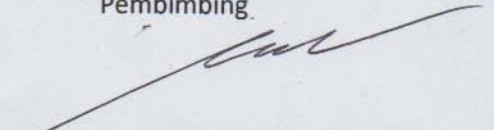
Menyetujui,

Reviewer



Dr. Aman, M.Pd.  
NIP. 19741015 200312 1 001

Pembimbing



Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd  
NIP. 19820704 201012 2 004